

ANALISIS PENGARUH KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Merry Wulandari

Institut Nida El Adabi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Correspondence: meyiwulan@gmail.com

Abstract

This study examines the impact of the Corruption Perceptions Index (CPI), Economic Growth, and Unemployment Rate on the Poverty Rate in Indonesia from 2008 to 2024. Utilizing time-series data and linear regression analysis, the research aims to uncover the relationships between these variables and their collective influence on poverty levels. The findings reveal that CPI has a significant negative effect on poverty, indicating that reducing corruption can lead to lower poverty rates. Unemployment shows a nearly significant positive effect, suggesting that higher unemployment exacerbates poverty, while Economic Growth does not exhibit a statistically significant impact in the model. The regression model explains 86.22% of the variation in poverty rates, highlighting its robustness, though autocorrelation issues were identified and warrant further attention. The study underscores the critical role of combating corruption and addressing unemployment as key strategies for poverty alleviation. While Economic Growth alone may not directly reduce poverty, fostering inclusive growth remains essential for long-term poverty reduction. Policy recommendations include enhancing transparency and accountability in public budget management, promoting labor-intensive economic sectors, and implementing skill development programs to reduce unemployment. These measures are vital for breaking the cycle of poverty and achieving sustainable development in Indonesia.

Keywords: Corruption; Economic Growth; Unemployment; Poverty; Linear Regression

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2024. Dengan menggunakan data deret waktu dan analisis regresi linier, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara variabel-variabel tersebut serta pengaruh kolektifnya terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CPI memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa penurunan korupsi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pengangguran memiliki pengaruh positif yang hampir signifikan, menunjukkan bahwa tingginya pengangguran memperburuk kemiskinan, sementara Pertumbuhan Ekonomi tidak berdampak signifikan dalam model ini. Model regresi mampu menjelaskan 86,22% variasi tingkat kemiskinan, menunjukkan kekuatannya, meskipun terdapat indikasi autokorelasi yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menekankan pentingnya memerangi korupsi dan mengatasi pengangguran sebagai strategi

utama untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun Pertumbuhan Ekonomi saja tidak secara langsung menurunkan kemiskinan, pertumbuhan yang inklusif tetap penting untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, mendorong sektor ekonomi padat karya, serta menerapkan program pengembangan keterampilan untuk mengurangi pengangguran. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi; Pertumbuhan Ekonomi; Pengangguran; Kemiskinan; Regresi Linier

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Fluktuasi tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum mampu menghasilkan dampak yang konsisten. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari adanya praktik korupsi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, serta tingginya tingkat pengangguran. Korupsi, sebagai penyakit sosial dan kelembagaan, menghambat efektivitas kebijakan pembangunan, mengurangi kepercayaan investor, serta memperlebar kesenjangan distribusi sumber daya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir cenderung stabil, namun belum mampu sepenuhnya menekan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pengangguran yang tinggi berpotensi memperparah kerentanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan menjadi isu penting yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan hubungan negatif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Mauro (1995) dan Mo (2001) misalnya, menegaskan bahwa korupsi berkontribusi signifikan terhadap melemahnya produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Davoodi dan Tanzi (1997) menemukan bahwa korupsi menyebabkan pengalihan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang rawan praktik korupsi sehingga menghambat pemerataan pembangunan. Gupta et al. (2002) bahkan menunjukkan bahwa korupsi

memperparah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, penelitian Alfada (2019) serta Haqiqi & Putra (2020) memperkuat temuan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mayoritas penelitian masih menitikberatkan pada hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi atau pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran sekaligus terhadap kemiskinan, khususnya dalam konteks Indonesia dengan data yang lebih mutakhir, masih relatif terbatas.

Korupsi

Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Transparency International, 2020). Korupsi bisa saja terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, nepotisme, penggelapan dana publik, dan kolusi, yang semuanya memiliki dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi merupakan fenomena global yang telah menarik perhatian banyak peneliti, ekonom, dan pembuat kebijakan.

Beberapa studi telah membuktikan bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Mauro (1995), korupsi mengurangi investasi domestik dan asing karena menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan biaya transaksi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mo (2001) yang menemukan bahwa korupsi secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Di Indonesia, penelitian oleh Tanzi dan Davoodi (1997) menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan alokasi anggaran yang tidak optimal, seperti pengalihan dana dari sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan ke proyek-proyek infrastruktur yang rentan korupsi.

Korupsi juga berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Gupta et al. (2002) menemukan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan dengan mengalihkan sumber daya dari masyarakat miskin ke kelompok elit. Di Indonesia, Korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, menghambat peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi Negara (Safira Nada Sabila et al., 2024).

Korupsi adalah fenomena kompleks yang sulit diukur secara langsung karena sifatnya yang tersembunyi dan melibatkan berbagai aktor. Namun, beberapa instrumen dan indeks telah dikembangkan untuk mengukur tingkat korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di dunia, korupsi diukur dengan menggunakan *Corruption Perception Index (CPI)* yang dikembangkan oleh Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional. CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk survei pakar dan pelaku bisnis. Skor berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). CPI mencakup hampir semua negara di dunia dan diterbitkan setiap tahun. Dimana Pada tahun 2023, Denmark menempati peringkat pertama dengan skor 90, sementara Indonesia berada di peringkat 110 dengan skor 34 (Transparency International, 2023).

Sedangkan di Indonesia dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK Indonesia menggunakan metodologi yang sama dengan CPI global, tetapi dengan fokus pada data dan konteks lokal. IPK Indonesia mencakup tingkat korupsi di sektor publik dan swasta. Pada tahun 2023, skor IPK Indonesia adalah 34, menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya (Transparency International Indonesia, 2023).

Pada periode 2013-2019, skor CPI Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 32 pada tahun 2013 menjadi 40 pada tahun 2019. Peningkatan ini mencerminkan upaya reformasi dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Pada tahun 2020, skor CPI Indonesia turun menjadi 37. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak

pandemi COVID-19, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya peluang korupsi, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan dana darurat.

Tabel 1. Grafik Perkembangan CPI Indonesia

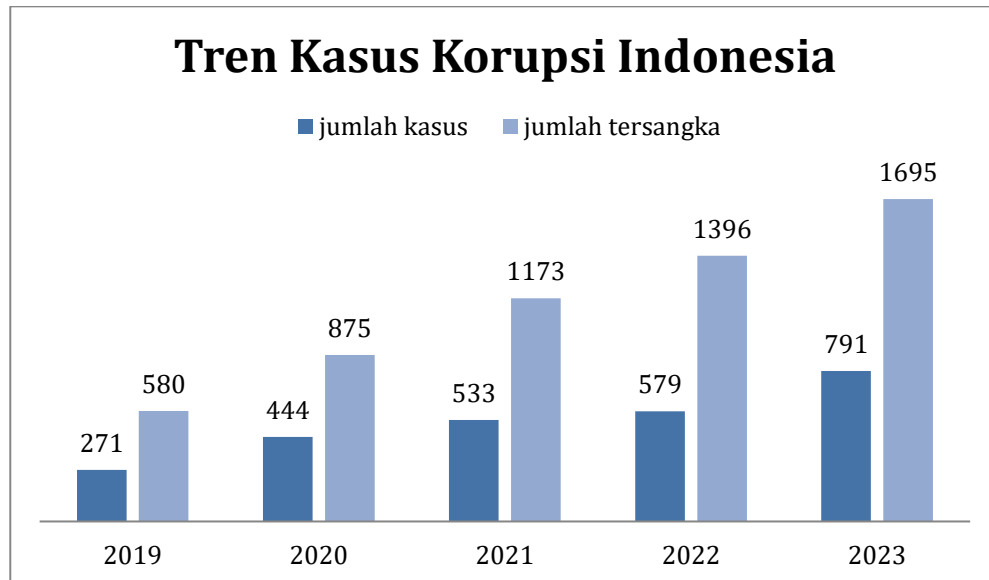


Sumber: Data Transparency International Indonesia

Pada tahun 2021, skor CPI Indonesia kembali naik menjadi 38, menunjukkan upaya pemulihan pasca-pandemi. Namun, kenaikan ini masih terbatas karena tantangan struktural dan politis yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2022 dan 2023, skor CPI Indonesia turun menjadi 34, level terendah sejak 2015. Penurunan ini mencerminkan berbagai masalah, termasuk melemahnya independensi KPK, meningkatnya korupsi di tingkat daerah, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2024, skor CPI Indonesia kembali naik menjadi 37. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh upaya pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 271 kasus dengan 580 tersangka. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2023, dengan 791 kasus dan 1.695 tersangka.

Tabel 2. Grafik Tren Kasus Korupsi Indonesia 2019-2023



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

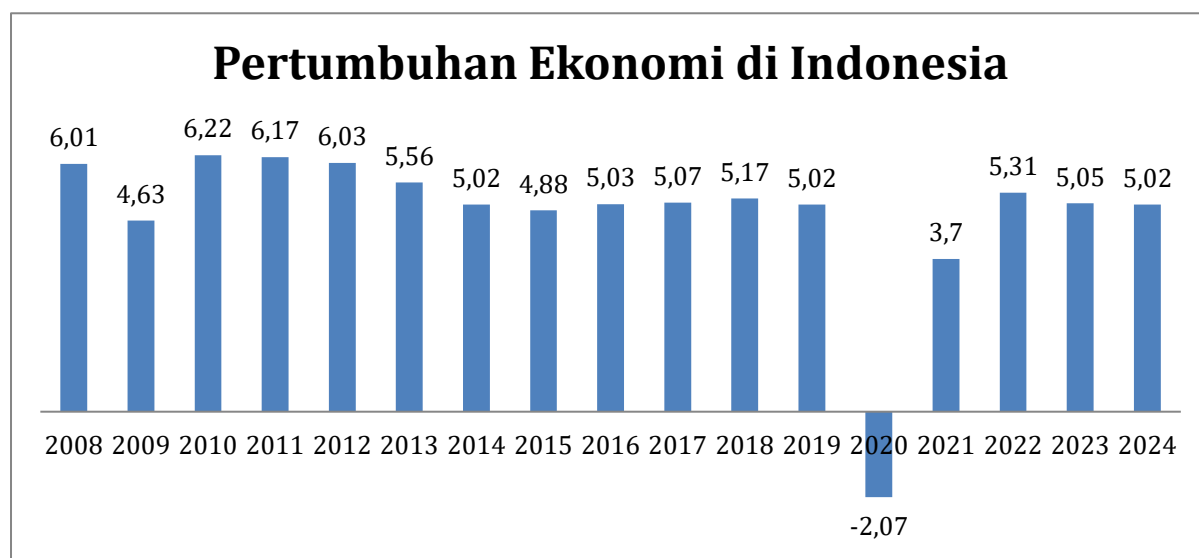
KPK dan lembaga penegak hukum lainnya mungkin telah meningkatkan intensitas investigasi dan penindakan kasus korupsi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan korupsi mungkin telah meningkat, didukung oleh media sosial dan platform pelaporan online. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah kasus (444) dan tersangka (875), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh korupsi yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menciptakan peluang baru untuk korupsi, terutama dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan kasus korupsi. Pada tahun 2023, jumlah kasus mencapai rekor tertinggi (791), menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Upaya KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi mungkin telah meningkat, yang tercermin dalam peningkatan jumlah kasus dan tersangka. Namun, peningkatan ini juga bisa mencerminkan bahwa korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu, yang diukur melalui PDB atau PNB. Faktor-faktor seperti investasi, teknologi, sumber daya manusia, dan kualitas institusi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, menghambat alokasi sumber daya yang efisien, dan memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan reformasi struktural menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah seperti memperkuat transparansi anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, dan mendorong tata kelola yang bersih dapat membantu meminimalkan penyimpangan ekonomi akibat korupsi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas—dengan manfaat yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



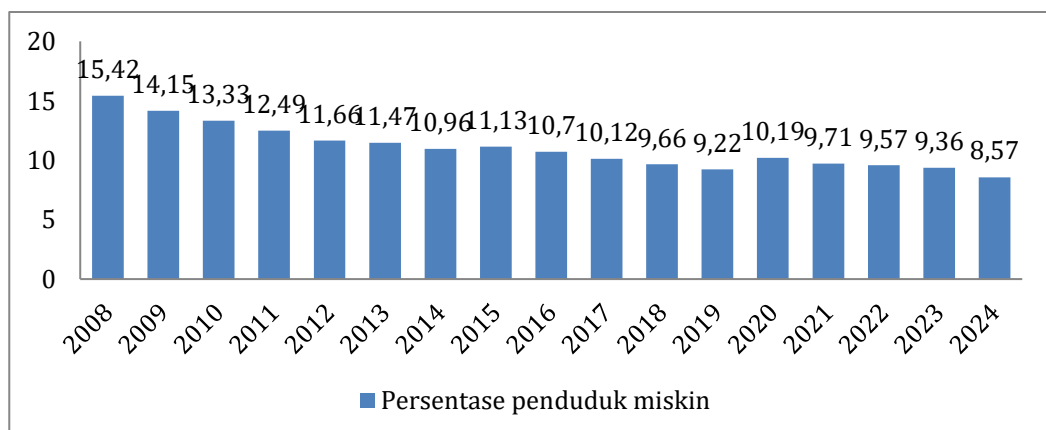
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2013 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil sebelum pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5%. Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020, tetapi pemulihan yang kuat terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,31% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di sekitar 5%, meskipun menghadapi tantangan global. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tidak hanya mengurangi kualitas hidup individu, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Kemiskinan bukan sekadar tentang kurangnya uang atau materi. Ini adalah kondisi menyedihkan di mana seseorang atau keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Bayangkan harus memilih antara makan hari ini atau menyekolahkan anak. Atau tinggal di gubuk reyot tanpa akses air bersih dan listrik yang layak. Inilah realitas yang dihadapi oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Tabel 4. Grafik Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Secara sederhana, pengangguran terjadi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada perekonomian negara secara keseluruhan. Penyebab pengangguran sangat beragam, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penciptaan lapangan kerja, ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, hingga perubahan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia. Dampaknya pun sangat serius, seperti meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan bahkan potensi kriminalitas.

Meskipun penelitian mengenai hubungan antara korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada hubungan parsial antarvariabel tersebut. Studi yang mengintegrasikan ketiganya secara simultan dalam konteks Indonesia dengan menggunakan data time-series jangka panjang (2008–2024) masih terbatas. Inilah yang menjadi gap penelitian dan sekaligus memberikan novelty dari studi ini. Dengan menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersamaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?; bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?; Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh CPI, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2008–2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain time-series analysis untuk menganalisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (CPI), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk menguji hubungan antar variabel secara empiris melalui analisis statistik menggunakan evIEWS 12.

Lokasi penelitian difokuskan pada konteks makroekonomi Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Transparency International. Data yang dianalisis mencakup periode 2008–2024 dengan total 17 observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi data sekunder resmi, sedangkan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh parsial maupun simultan dari CPI, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan. Untuk memastikan ketepatan hasil, analisis dilengkapi dengan uji asumsi klasik dan uji diagnostik model, termasuk pemeriksaan auto korelasi.

Penelitian ini berfokus pada konteks makroekonomi Indonesia dengan unit analisis berupa data tahunan tingkat nasional. Data yang digunakan adalah data sekunder resmi yang mencakup periode tahun 2008–2024 dengan total 17 observasi. Partisipan dalam penelitian ini tidak berupa individu, melainkan data makro ekonomi yang mewakili kondisi perekonomian Indonesia secara agregat.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber resmi yang kredibel, yaitu:

1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI): diambil dari laporan tahunan Transparency International.
2. Pertumbuhan Ekonomi (% PDB): diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan (%): diperoleh dari publikasi tahunan BPS.

Tabel 5. Tabulasi data diolah

Tahun	CPI Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penduduk Miskin (%)	Pengangguran (%)
2008	26	6,01	14,24	14,24
2009	28	4,63	12,93	12,93
2010	28	6,22	14,24	14,24
2011	30	6,17	10,23	10,23
2012	32	6,03	7,01	7,01
2013	32	5,56	5,01	5,01
2014	34	5,02	11,25	4,3
2015	36	4,88	11,22	5,98
2016	37	5,03	10,86	4,54
2017	37	5,07	10,64	5,25
2018	38	5,17	9,82	5,88
2019	40	5,02	9,41	5,64
2020	37	-2,07	9,78	7,35
2021	38	3,7	10,14	5,98
2022	34	5,31	9,54	4,8
2023	34	5,05	9,36	5,18
2024	37	5,02	9,03	5,25

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi**, yaitu dengan menghimpun data sekunder dari publikasi resmi lembaga internasional dan nasional. Data kemudian ditabulasi dalam bentuk deret waktu (time-series) untuk memudahkan analisis kuantitatif.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y): Tingkat Kemiskinan (%)
2. Variabel Independen:
 - X1 = Indeks Persepsi Korupsi (CPI)
 - X2 = Pertumbuhan Ekonomi (%)
 - X3 = Tingkat Pengangguran (%)

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Model regresi yang digunakan adalah:

$$\text{Kemiskinan} = \beta_0 + \beta_1 \text{CPI} + \beta_2 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + \beta_3 \text{Pengangguran} + \epsilon$$

Dimana:

- β_0 = konstanta,
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi,
- ϵ = error term.

Selain itu, penelitian juga menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan model menjelaskan variasi kemiskinan, uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel independen, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan. Uji diagnostik seperti Durbin-Watson juga dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan autokorelasi pada data time-series.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/13/25 Time: 11:48
Sample: 2008 2024
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.48516	3.999884	4.621425	0.0005
X1	-0.265261	0.090757	-2.922756	0.0119
X2	-0.004212	0.116266	-0.036226	0.9717
X3	0.219108	0.102010	2.147905	0.0512
R-squared	0.862215	Mean dependent var	11.04176	
Adjusted R-squared	0.830418	S.D. dependent var	1.879848	
S.E. of regression	0.774128	Akaike info criterion	2.528165	
Sum squared resid	7.790564	Schwarz criterion	2.724215	
Log likelihood	-17.48940	Hannan-Quinn criter.	2.547653	
F-statistic	27.11652	Durbin-Watson stat	0.491835	
Prob(F-statistic)	0.000007			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier pada hasil pengolahan data, ditemukan bahwa:

- a. Indeks Persepsi Korupsi (CPI/X1) memiliki koefisien negatif sebesar -0.265 dan signifikan secara statistik ($p\text{-value } 0.0119 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan CPI (penurunan tingkat korupsi) berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan.
- b. Pertumbuhan Ekonomi (X2) menunjukkan koefisien negatif kecil (-0.004) tetapi tidak signifikan ($p\text{-value } 0.9717 > 0.05$), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam model ini tidak secara langsung memengaruhi kemiskinan.
- c. Tingkat Pengangguran (X3) memiliki koefisien positif 0.219 dan mendekati signifikansi statistik ($p\text{-value } 0.0512 \approx 0.05$), menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung memperburuk kemiskinan.

Model ini memiliki R-squared 0.862, artinya 86.2% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen. Namun, uji Durbin-Watson (0.492) mengindikasikan adanya autokorelasi positif, yang menjadi keterbatasan dalam model ini.

Pembahasan

Dampak Korupsi terhadap Kemiskinan

Temuan bahwa korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar -0,265261 dan nilai probabilitas 0,0119. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 poin CPI (yang mencerminkan menurunnya tingkat korupsi), mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,265% dengan asumsi variabel lain konstan, sejalan dengan penelitian Mauro (1995) dan Gupta et al. (2002), yang menyatakan bahwa korupsi mengganggu alokasi sumber daya publik dan memperburuk ketimpangan. Di Indonesia, hasil ini juga konsisten dengan studi

Alfada (2019) yang menemukan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan inklusif. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap kemiskinan tetap signifikan bahkan setelah memasukkan variabel pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam model yang sama.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Signifikan

Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,004212, namun tidak signifikan dengan probabilitas 0,9717. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan kemiskinan, pada konteks Indonesia periode 2008–2024, pertumbuhan tersebut belum inklusif sehingga tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak signifikkannya pertumbuhan ekonomi dalam memengaruhi kemiskinan bertentangan dengan teori konvensional yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Kuznets, 1955). Temuan ini mendukung argumen Haqiqi & Putra (2020) bahwa di Indonesia, pertumbuhan ekonomi seringkali tidak inklusif dan terpusat di sektor tertentu yang tidak menyerap tenaga kerja secara merata. Dengan demikian, kebijakan pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan pada sektor padat karya dan pemerataan akses ekonomi.

Pengangguran dan Kemiskinan

Variabel pengangguran (X3) memiliki koefisien positif sebesar 0,219108 dengan nilai probabilitas 0,0512, yang berada pada ambang signifikansi. Artinya, setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,219%. Hasil ini menegaskan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi kemiskinan. Tingginya angka pengangguran mencerminkan tidak optimalnya serapan tenaga kerja sehingga berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga. Koefisien pengangguran yang positif dan hampir signifikan memperkuat temuan Safira et al. (2024) bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Namun, ketidaksigifikanan yang marginal (p-value 0.0512) menunjukkan bahwa mungkin ada faktor lain yang memediasi hubungan ini, seperti

tingkat pendidikan atau program bantuan sosial, yang tidak dimasukkan dalam model.

Penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan mengintegrasikan ketiga variabel (korupsi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran) dalam satu model. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi faktor dominan, berbeda dengan studi Nairobi (2021) yang hanya fokus pada korupsi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pengangguran. Selain itu, autokorelasi dalam model ini mengindikasikan perlunya pendekatan analisis yang lebih kompleks, seperti *Vector Error Correction Model (VECM)*, untuk menangani dinamika time-series.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dapat diambil dari temuan ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tata kelola dan orientasi pembangunan yang berkeadilan. *Pertama*, penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi hal yang sangat mendesak. Korupsi yang merajalela tidak hanya menghambat efektivitas program-program sosial, tetapi juga menyebabkan kebocoran anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin.

Kedua, pemerintah perlu mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih inklusif. Artinya, pembangunan harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya merupakan motor penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan hasil pertumbuhan secara lebih merata. Di samping itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga harus diperluas agar masyarakat memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang memadai di pasar kerja.

Ketiga, pengangguran yang tinggi masih menjadi faktor krusial dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dirancang program pelatihan

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan strategi ini, diharapkan tekanan terhadap angka kemiskinan dapat dikurangi secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang produktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (CPI), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia pada periode 2008–2024. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama:

Pertama, CPI berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai CPI yang menandakan rendahnya tingkat korupsi, semakin rendah pula tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk menurunkan kemiskinan.

Kedua, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode penelitian belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menurunkan kemiskinan secara nyata.

Ketiga, pengangguran berpengaruh positif dan hampir signifikan terhadap kemiskinan. Kenaikan tingkat pengangguran cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan, menandakan bahwa ketersediaan lapangan kerja merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan.

Secara simultan, ketiga variabel independen yang dianalisis mampu menjelaskan 86,22% variasi kemiskinan di Indonesia. Namun, model masih menghadapi masalah autokorelasi, sehingga memerlukan pendekatan statistik lanjutan agar hasil estimasi lebih kuat.

Saran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan, yaitu:

Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Peningkatan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, serta akuntabilitas birokrasi harus terus diperkuat agar dampak negatif korupsi terhadap distribusi sumber daya publik dapat diminimalisasi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka PDB, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Kebijakan fiskal dan program pembangunan sebaiknya diarahkan untuk sektor-sektor padat karya, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat miskin.

Ketiga, pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja produktif. Investasi dalam sektor UMKM, pelatihan tenaga kerja berbasis keterampilan, serta dukungan terhadap wirausaha sosial dapat membantu menekan angka pengangguran dan sekaligus menurunkan kemiskinan.

Keempat, perbaikan metodologis dalam penelitian kebijakan. Mengingat adanya indikasi autokorelasi, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode koreksi seperti Generalized Least Squares (GLS) atau memasukkan variabel kontrol lain seperti inflasi, kualitas institusi, atau belanja sosial pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan penurunan pengangguran merupakan prioritas kebijakan yang strategis untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Davoodi, H., & Tanzi, V. (1997). Corruption, public investment, and growth. *IMF Working Paper No. 97/139*. <https://doi.org/10.5089/9781451929515.001>

- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23–45. <https://doi.org/10.1007/s101010100039>
- Haqiqi, A. H., & Putra, H. (2020). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 115–126. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2325>
- Hidayat, R., & Salsabila, N. (2023). Social and economic impact of unemployment, poverty, and economic growth on Indonesia's performance (2000–2020). *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 7(4), 1–13.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Mo, P. H. (2001). Corruption and economic growth. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 66–79. <https://doi.org/10.1006/jcec.2000.1703>
- Nairobi, N. (2021). Corruption and economic growth at province levels in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK)*, 14(2), 387–400. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i2.25996>
- Nugroho, A., & Hartati, T. (2023). Regional inequality, human capital, unemployment, and Indonesia's economic growth. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2251803. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2251803>
- Safira, N. S., Gamayuni, R. R., Suhendro, S., & Azhar, R. (2024). The effect of accountability, transparency, and abnormal accrual against potential corruption in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 1(3), 213–229. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i3.112>
- Sari, D. P., & Putri, M. (2023). The moderating role of economic growth in the association between corruption and poverty in Indonesia. *Journal of Development Economics Studies*, 11(2), 55–68.
- Siregar, R., & Pratama, Y. (2022). The mystery of the correlation between the Corruption Perception Index and macroeconomic indicators in Indonesia. *Indonesian Journal of Governance Studies*, 4(2), 101–115.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Asian Development Studies*, 9(3), 112–129.
- Wahyuni, D., & Rahman, F. (2021). The impact of corruption, inflation and unemployment on poverty in Indonesia (1998–2017). *Jurnal Bina Praja: JBEST*, 13(2), 145–158.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>